



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3

- jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan;
  - b. Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - c. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan negara;
  - d. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - e. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp5.703.100.309.342,23	
b. Belanja	<u>Rp5.530.173.461.667,19</u>	
Surplus		Rp172.926.847.675,04
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp494.060.546.739,46	
- Pengeluaran	<u>Rp112.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp381.560.546.739,46

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp(28.203.773.653,23) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp5.674.896.535.689,00        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp5.703.100.309.342,23</u> |
| Selisih                                  | Rp (28.203.773.653,23)        |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp516.676.287.160,81 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp6.046.849.748.828,00        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp5.530.173.461.667,19</u> |
| Selisih                               | Rp 516.676.287.160,81         |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(544.880.060.814,04) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp(371.953.213.139,00)       |
| 2. Realisasi Surplus                          | <u>Rp 172.926.847.675,04</u> |
| Selisih                                       | Rp(544.880.060.814,04)       |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(4.607.333.600,46) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp489.453.213.139,00        |
| 2. Realisasi  | <u>Rp494.060.546.739,46</u> |
| Selisih   | Rp (4.607.333.600,46)       |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp117.590.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp112.500.000.000,00</u>
Selisih	Rp 5.000.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(9.607.333.600,46) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp371.953.213.139,00
2. Realisasi	<u>Rp381.560.546.739,46</u>
Selisih	Rp (9.607.333.600,46)
g. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Dana Keistimewaan yang merupakan bagian dari Belanja, sejumlah Rp60.641.269.482,95 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja Dana Keistimewaan setelah perubahan	Rp1.320.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp1.259.358.730.517,05</u>
Selisih	Rp 60.641.269.482,95

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp484.453.213.139,46
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp484.453.213.139,46</u>
c. Saldo	Rp 0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>Rp554.487.394.414,50</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp554.487.394.414,50

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp11.999.264.977.104,20
b. Jumlah kewajiban	Rp 48.687.380.760,56
c. Jumlah ekuitas	Rp11.950.577.596.343,60

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional	Rp6.634.418.364.309,50
b. Beban	Rp5.620.469.990.939,02

c. Surplus Kegiatan Operasional	Rp1.013.948.373.370,48
d. Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp 5.721.901.972,37
e. Surplus-Laporan Operasional	Rp1.019.670.275.342,85

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp484.453.213.139,46
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp826.366.996.986,43
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(756.332.815.711,39)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	Rp554.487.394.414,50

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp11.290.686.277.272,30
b. Surplus Laporan Operasional	Rp 1.019.670.275.342,85
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp (359.778.956.271,55)
d. Ekuitas Akhir	Rp11.950.577.596.343,60

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan

- jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  3. Lampiran III : Laporan Operasional;
  4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  5. Lampiran V : Neraca;
  6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
  8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
  10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
  12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  19. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
    - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
    - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
B. KADARMANTA BASKARA AJI



LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 8. - 136 / 2022 )

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.674.896.535.689,00</b>	<b>5.703.100.309.342,23</b>	<b>100,50</b>	<b>5.611.510.924.299,71</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.851.579.698.446,00</b>	<b>1.900.923.074.881,46</b>	<b>102,11</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>
Pajak Daerah	1.658.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	101,20	1.646.559.196.863,00
Retribusi Daerah	34.367.915.101,00	38.512.949.895,00	112,06	36.545.077.142,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.923.341.444,00	66.336.516.913,54	102,57	101.480.382.151,46
Lain-lain PAD yang Sah	64.803.205.664,00	77.627.764.149,92	119,79	92.141.171.197,54
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<b>1.861.579.698.446,00</b>	<b>1.900.923.074.881,46</b>	<b>102,11</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.805.740.337.243,00</b>	<b>3.794.855.660.531,00</b>	<b>99,71</b>	<b>3.726.454.595.432,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	99,71	3.726.074.576.242,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00	780.019.190,00
Total Pendapatan Transfer	<b>3.805.740.337.243,00</b>	<b>3.794.855.660.531,00</b>	<b>99,71</b>	<b>3.726.454.595.432,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.321.573.929,77</b>	<b>96,64</b>	<b>8.349.499.513,00</b>
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	94,26	8.349.499.513,00
Dana Darurat	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	179.943.929,77	-	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.321.573.929,77</b>	<b>96,64</b>	<b>8.349.499.513,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.674.896.535.689,00</b>	<b>5.703.100.309.342,23</b>	<b>100,50</b>	<b>5.611.510.924.299,71</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.046.849.748.828,00</b>	<b>5.530.173.461.667,19</b>	<b>91,46</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.968.292.407.780,00</b>	<b>3.575.258.030.927,29</b>	<b>90,10</b>	<b>3.101.070.722.657,40</b>
Belanja Pegawai	1.678.209.261.750,00	1.561.540.562.725,00	93,04	1.562.236.884.707,39
Belanja Barang dan Jasa	1.266.950.234.707,00	1.038.417.692.655,29	82,04	707.629.279.470,01
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	73.414.802.510,00	73.315.381.521,00	99,86	78.044.846.317,00
Belanja Hibah	920.256.898.813,00	878.407.044.213,00	95,45	744.149.764.252,00
Belanja Bantuan Sosial	29.331.210.000,00	22.577.159.813,00	75,97	9.009.947.911,00
Jumlah Belanja Operasi	<b>3.968.292.407.780,00</b>	<b>3.575.258.030.927,29</b>	<b>90,10</b>	<b>3.101.070.722.657,40</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>723.326.438.796,00</b>	<b>654.839.728.747,39</b>	<b>90,53</b>	<b>940.633.924.931,64</b>
Belanja Modal Tanah	195.827.455.687,00	185.263.842.550,00	94,61	696.800.024.901,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.750.430.670,00	153.069.731.585,00	81,96	137.484.204.942,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.353.042.040,00	66.855.285.344,54	84,25	52.813.388.365,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.341.014.425,00	214.309.752.467,85	95,10	38.021.109.346,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.054.495.974,00	35.344.116.820,00	98,03	15.715.197.377,00
Jumlah Belanja Modal	<b>723.326.438.796,00</b>	<b>654.839.728.747,39</b>	<b>90,53</b>	<b>940.633.924.931,64</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>90.726.238.027,00</b>	<b>53.316.587.701,00</b>	<b>58,77</b>	<b>305.639.352.770,00</b>
Belanja Tidak Terduga	90.726.238.027,00	53.316.587.701,00	58,77	305.639.352.770,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	<b>90.726.238.027,00</b>	<b>53.316.587.701,00</b>	<b>58,77</b>	<b>305.639.352.770,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.264.504.664.225,00</b>	<b>1.246.759.114.291,51</b>	<b>98,60</b>	<b>1.085.836.698.996,63</b>
Belanja Bagi Hasil	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	100,00	693.851.520.604,00
Belanja Bantuan Keuangan	551.386.348.058,00	533.640.796.124,51	96,78	391.944.778.392,63
Jumlah Belanja Transfer	<b>1.264.504.664.225,00</b>	<b>1.246.759.114.291,51</b>	<b>98,60</b>	<b>1.085.836.698.996,63</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.046.849.748.828,00</b>	<b>5.530.173.461.667,19</b>	<b>91,46</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(371.953.213.139,00)</b>	<b>172.926.847.675,04</b>	<b>(46,49)</b>	<b>178.330.224.944,04</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>371.953.213.139,00</b>	<b>381.560.546.739,46</b>	<b>102,58</b>	<b>306.122.988.195,42</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>489.453.213.139,00</b>	<b>494.060.546.739,46</b>	<b>100,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.453.213.139,00	484.453.213.139,46	100,00	420.567.958.995,42
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	9.607.333.600,00	192,15	3.145.029.200,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan	<b>489.453.213.139,00</b>	<b>494.060.546.739,46</b>	<b>100,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>117.500.000.000,00</b>	<b>112.500.000.000,00</b>	<b>95,74</b>	<b>117.590.000.000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000,00	112.500.000.000,00	100,00	113.590.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran	<b>117.500.000.000,00</b>	<b>112.500.000.000,00</b>	<b>95,74</b>	<b>117.590.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>371.953.213.139,00</b>	<b>381.560.546.739,46</b>	<b>102,58</b>	<b>306.122.988.195,42</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>584.467.364.414,50</b>	<b>-</b>	<b>484.453.213.139,46</b>

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 MAMENGGU BUWONO X

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.861.579.698.446,00</b>	<b>1.900.923.074.881,46</b>	<b>102,11</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>
Pendapatan Pajak Daerah	1.668.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	101,20	1.646.559.198.863,00
Pendapatan Retribusi Daerah	34.367.915.101,00	38.512.949.895,00	112,06	36.546.077.142,71
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	102,57	101.460.382.151,46
Lain-lain PAD Yang Sah	64.803.205.864,00	77.627.764.149,92	119,79	92.141.171.197,54
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<b>1.861.579.698.446,00</b>	<b>1.900.923.074.881,46</b>	<b>102,11</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.447.769.129.853,00</b>	<b>2.436.884.453.142,00</b>	<b>99,56</b>	<b>2.371.044.354.021,00</b>
Dana Bagi Hasil	107.891.375.932,00	132.615.520.738,00	123,26	114.277.342.675,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.224.852.487.000,00	1.224.852.487.000,00	100,00	1.227.647.676.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik	161.117.379.000,00	135.901.240.001,00	84,35	121.052.748.710,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik	954.207.887.921,00	943.515.205.403,00	98,88	908.066.586.636,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	<b>2.447.769.129.853,00</b>	<b>2.436.884.453.142,00</b>	<b>99,56</b>	<b>2.371.044.354.021,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>1.357.166.162.080,00</b>	<b>1.357.166.162.079,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.354.630.222.221,00</b>
Dana Keistimewaan	1.279.572.655.080,00	1.279.572.655.079,00	100,00	1.286.576.228.221,00
Dana Penyesuaian	77.593.507.000,00	77.593.507.000,00	100,00	68.053.994.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	<b>1.357.166.162.080,00</b>	<b>1.357.166.162.079,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.354.630.222.221,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>805.045.310,00</b>	<b>805.045.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>780.019.190,00</b>
Bantuan Keuangan	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00	780.019.190,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>805.045.310,00</b>	<b>805.045.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>780.019.190,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>3.805.740.337.243,00</b>	<b>3.794.855.660.531,00</b>		<b>3.726.454.595.432,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.321.573.929,77</b>	<b>96,64</b>	<b>8.349.499.513,00</b>
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	94,26	8.349.499.513,00
Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	179.943.929,77	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.321.573.929,77</b>	<b>96,64</b>	<b>8.349.499.513,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.674.896.535.689,00</b>	<b>5.703.100.309.342,23</b>	<b>100,50</b>	<b>5.611.510.924.299,71</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.968.292.407.780,00</b>	<b>3.575.258.030.927,29</b>	<b>90,10</b>	<b>3.101.070.722.657,40</b>
Belanja Pegawai	1.678.299.261.750,00	1.561.540.552.725,00	93,04	1.562.236.884.707,39
Belanja Barang dan Jasa	1.266.990.234.707,00	1.039.417.892.655,29	82,04	707.629.279.470,01
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	73.414.802.510,00	73.315.381.621,00	99,86	78.044.846.317,00
Belanja Hibah	920.256.898.813,00	876.407.044.213,00	95,15	744.149.764.252,00
Belanja Bantuan Sosial	29.331.210.000,00	22.577.159.813,00	76,97	9.009.947.911,00
Jumlah Belanja Operasi	<b>3.968.292.407.780,00</b>	<b>3.575.258.030.927,29</b>	<b>90,10</b>	<b>3.101.070.722.657,40</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>723.326.438.796,00</b>	<b>654.839.728.747,39</b>	<b>90,53</b>	<b>940.633.924.931,64</b>
Belanja Modal Tanah	195.827.455.687,00	185.263.842.550,00	94,61	696.800.024.901,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.750.430.670,00	153.066.731.565,00	81,96	137.484.204.942,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.353.042.040,00	68.855.285.344,54	86,78	52.613.388.365,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.341.014.425,00	214.309.752.467,85	95,10	38.021.109.346,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.054.495.974,00	35.344.116.820,00	98,03	15.715.197.377,00
Jumlah Belanja Modal	<b>723.326.438.796,00</b>	<b>654.839.728.747,39</b>	<b>90,53</b>	<b>940.633.924.931,64</b>

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>90.726.238.027,00</b>	<b>53.316.587.701,00</b>	<b>58,77</b>	<b>305.639.352.770,00</b>
Belanja Tak Terduga	90.726.238.027,00	53.316.587.701,00	58,77	305.639.352.770,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>90.726.238.027,00</b>	<b>53.316.587.701,00</b>	<b>58,77</b>	<b>305.639.352.770,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dan Desa	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	100,00	693.691.920.604,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	499.894.603.058,00	484.644.483.000,29	96,95	390.599.778.392,63
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	51.491.745.000,00	48.996.315.124,22	95,15	1.345.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>1.264.504.664.225,00</b>	<b>1.246.759.114.291,51</b>	<b>98,60</b>	<b>1.085.836.698.996,63</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.046.849.748.826,00</b>	<b>5.530.173.461.667,19</b>	<b>91,46</b>	<b>5.433.180.699.355,67</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(371.953.213.139,00)</b>	<b>172.926.847.675,04</b>	<b>(46,49)</b>	<b>178.330.224.944,04</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>489.453.213.139,00</b>	<b>494.060.546.739,46</b>	<b>100,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>
Penggunaan SILPA	484.453.213.139,00	484.453.213.139,46	100,00	420.567.958.995,42
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	9.607.333.600,00	192,15	3.145.029.200,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>489.453.213.139,00</b>	<b>494.060.546.739,46</b>	<b>100,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>117.500.000.000,00</b>	<b>112.500.000.000,00</b>		<b>117.590.000.000,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	112.500.000.000,00	112.500.000.000,00	100,00	113.590.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	-	-	4.000.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>117.500.000.000,00</b>	<b>112.500.000.000,00</b>	<b>95,74</b>	<b>117.590.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>371.953.213.139,00</b>	<b>381.560.546.739,46</b>	<b>102,58</b>	<b>306.122.988.195,42</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>554.457.304.414,50</b>		<b>484.453.213.139,46</b>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.871.214.550,00	45.513.297.506,22	6.641.982.956,22	117,09
1.01.	PENDIDIKAN	3.329.079.000,00	3.564.124.414,00	255.045.414,00	107,66
1.01.1.01.03.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.329.079.000,00	3.564.124.414,00	255.045.414,00	107,66
1.01.1.01.03.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.329.079.000,00	3.564.124.414,00	255.045.414,00	107,66
1.01.1.01.03.4.1.02.	Retribusi Daerah	539.435.000,00	870.127.183,00	(330.692.183,00)	161,30
1.01.1.01.03.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	2.789.644.000,00	2.713.997.231,00	(75.646.769,00)	97,29
1.02.	KESEHATAN	32.530.305.200,00	38.741.796.742,22	6.211.491.542,22	119,09
1.02.1.02.01.	DINAS KESEHATAN	32.530.305.200,00	38.741.796.742,22	6.211.491.542,22	119,09
1.02.1.02.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.530.305.200,00	38.741.796.742,22	6.211.491.542,22	119,09
1.02.1.02.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	32.530.305.200,00	38.741.796.742,22	6.211.491.542,22	119,09
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.579.986.350,00	2.748.972.350,00	168.986.000,00	106,55
1.03.1.03.13.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2.579.986.350,00	2.748.972.350,00	168.986.000,00	106,55
1.03.1.03.13.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.579.986.350,00	2.748.972.350,00	168.986.000,00	106,55
1.03.1.03.13.4.1.02.	Retribusi Daerah	2.511.931.350,00	2.680.917.350,00	168.986.000,00	106,73
1.03.1.03.13.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	68.055.000,00	68.055.000,00	-	100,00
1.05.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.744.000,00	50.204.000,00	6.460.000,00	114,77
1.05.1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	43.744.000,00	50.204.000,00	6.460.000,00	114,77
1.05.1.05.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.744.000,00	50.204.000,00	6.460.000,00	114,77
1.05.1.05.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	43.744.000,00	50.204.000,00	6.460.000,00	114,77
1.06.	SOSIAL	388.200.000,00	388.200.000,00	-	100,00
1.06.1.06.01.	DINAS SOSIAL	388.200.000,00	388.200.000,00	-	100,00
1.06.1.06.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	388.200.000,00	388.200.000,00	-	100,00
1.06.1.06.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	388.200.000,00	388.200.000,00	-	100,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.953.749.550,00	22.735.190.713,99	2.671.301.163,00	113,31
2.11.	LINGKUNGAN HIDUP	18.334.140.250,00	20.139.130.683,00	1.804.990.433,00	109,84
2.11.2.11.02.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	18.334.140.250,00	20.139.130.683,00	1.804.990.433,00	109,84
2.11.2.11.02.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.334.140.250,00	20.139.130.683,00	1.804.990.433,00	109,84
2.11.2.11.02.4.1.02.	Retribusi Daerah	17.401.295.650,00	19.095.793.005,00	1.694.497.658,00	109,74
2.11.2.11.02.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	932.844.600,00	1.043.337.375,00	110.492.775,00	111,84
2.15.	PERHUBUNGAN	889.306.800,00	1.434.998.800,00	545.399.000,00	161,33
2.15.2.15.01.	DINAS PERHUBUNGAN	889.306.800,00	1.434.998.800,00	545.399.000,00	161,33
2.15.2.15.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	889.306.800,00	1.434.998.800,00	545.399.000,00	161,33
2.15.2.15.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	889.306.800,00	1.432.434.800,00	543.128.000,00	161,07
2.15.2.15.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00
2.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
2.16.2.16.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
2.16.2.16.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
2.16.2.16.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
2.17.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	129.500.000,00	538.843.392,00	409.343.392,00	416,10
2.17.2.17.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	129.500.000,00	538.843.392,00	409.343.392,00	416,10
2.17.2.17.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.500.000,00	538.843.392,00	409.343.392,00	416,10
2.17.2.17.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00
2.17.2.17.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	125.300.000,00	534.643.392,00	409.343.392,00	406,89
2.18.	PENANAMAN MODAL	388.210.000,00	215.161.000,00	(173.049.000,00)	55,42
2.18.2.18.01.	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	388.210.000,00	215.161.000,00	(173.049.000,00)	55,42
2.18.2.18.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	388.210.000,00	215.161.000,00	(173.049.000,00)	55,42
2.18.2.18.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	387.070.000,00	214.625.000,00	(172.445.000,00)	55,36
2.18.2.18.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	540.000,00	536.000,00	(4.000,00)	99,25
2.22.	KEBUDAYAAN	183.192.500,00	276.023.500,00	92.831.000,00	150,67
2.22.2.22.01.	DINAS KEBUDAYAAN	183.192.500,00	276.023.500,00	92.831.000,00	150,67
2.22.2.22.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.192.500,00	276.023.500,00	92.831.000,00	150,67
2.22.2.22.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	170.292.500,00	241.033.500,00	70.741.000,00	141,54
2.22.2.22.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	12.900.000,00	34.990.000,00	22.090.000,00	271,24
2.23.	PERPUSTAKAAN	137.600.000,00	129.395.338,00	(8.204.662,00)	94,04
2.23.2.23.02.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	137.600.000,00	129.395.338,00	(8.204.662,00)	94,04
2.23.2.23.02.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137.600.000,00	129.395.338,00	(8.204.662,00)	94,04
2.23.2.23.02.4.1.02.	Retribusi Daerah	137.600.000,00	128.900.000,00	(6.699.400,00)	93,70
2.23.2.23.02.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	464.738,00	464.738,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.895.580.026,00	6.069.019.062,09	1.173.429.066,00	123,97
3.25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.608.919.100,00	1.613.677.450,00	4.758.350,00	100,30
3.25.3.25.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.608.919.100,00	1.613.677.450,00	4.758.350,00	100,30
3.25.3.25.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.608.919.100,00	1.613.677.450,00	4.758.350,00	100,30
3.25.3.25.01.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.603.919.100,00	1.611.102.200,00	7.183.100,00	100,45
3.25.3.25.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	2.575.250,00	(2.424.750,00)	51,51
3.26.	PARIWISATA	35.250.000,00	53.836.220,00	18.586.220,00	152,73
3.26.3.26.01.	DINAS PARIWISATA	35.250.000,00	53.836.220,00	18.586.220,00	152,73
3.26.3.26.01.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.250.000,00	53.836.220,00	18.586.220,00	152,73
3.26.3.26.01.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	35.250.000,00	53.836.220,00	18.586.220,00	152,73
3.27.	PERTANIAN	1.643.414.926,00	2.297.436.718,00	654.021.792,00	139,80
3.27.3.27.02.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.643.414.926,00	2.297.436.718,00	654.021.792,00	139,80
3.27.3.27.02.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.643.414.926,00	2.297.436.718,00	654.021.792,00	139,80
3.27.3.27.02.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.530.688.526,00	2.142.468.318,00	611.809.392,00	139,07
3.27.3.27.02.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	112.726.400,00	154.968.400,00	42.242.000,00	137,45
3.31.	PERINDUSTRIAN	197.200.000,00	214.422.149,00	17.222.149,00	106,73
3.31.3.31.02.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	197.200.000,00	214.422.149,00	17.222.149,00	106,73
3.31.3.31.02.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.200.000,00	214.422.149,00	17.222.149,00	106,73
3.31.3.31.02.4.1.02.	Retribusi Daerah	177.200.000,00	190.435.966,00	13.235.966,00	107,47
3.31.3.31.02.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	20.000.000,00	23.986.183,00	3.986.183,00	119,80
3.32.	TRANSMIGRASI	1.410.806.000,00	1.889.646.555,00	478.840.555,00	133,94
3.32.3.32.02.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.410.806.000,00	1.889.646.555,00	478.840.555,00	133,94
3.32.3.32.02.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.410.806.000,00	1.889.646.555,00	478.840.555,00	133,94
3.32.3.32.02.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.410.806.000,00	1.889.646.555,00	478.840.555,00	133,94

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.02	KEUANGAN	1.527.363.558.582,00	1.460.497.516.112,71	(66.866.042.469,29)	95,62
5.02.5.02.04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.527.363.558.582,00	1.460.497.516.112,71	(66.866.042.469,29)	95,62
5.02.5.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	169.452.512.330,00	157.872.694.990,20	(11.579.816.239,80)	93,17
5.02.5.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	136.801.510.770,00	120.044.049.505,00	(7.556.861.205,00)	94,47
5.02.5.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.651.001.560,00	28.828.044.525,20	(4.022.957.034,80)	87,75
5.02.5.02.04.5.2	BELANJA MODAL	2.880.144.000,00	2.549.120.000,00	(131.023.970,00)	95,11
5.02.5.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.579.019.000,00	1.522.408.530,00	(57.210.470,00)	96,38
5.02.5.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.600.000,00	140.964.000,00	(2.636.000,00)	98,18
5.02.5.02.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	696.925.000,00	865.727.500,00	(71.197.500,00)	92,56
5.02.5.02.04.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	90.725.238.027,00	93.316.387.701,00	(37.499.650.326,00)	96,77
5.02.5.02.04.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	90.725.238.027,00	93.316.387.701,00	(37.499.650.326,00)	96,77
5.02.5.02.04.5.4	BELANJA TRANSFER	1.264.504.664.225,00	1.246.759.114.291,51	(17.745.549.933,49)	98,60
5.02.5.02.04.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	-	100,00
5.02.5.02.04.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.386.348.058,00	533.640.798.124,51	(17.745.549.933,49)	96,78
5.03	KEPEGAWAIAN	30.723.814.479,00	27.860.319.681,00	(2.843.494.798,00)	90,74
5.03.5.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	30.723.814.479,00	27.860.319.681,00	(2.843.494.798,00)	90,74
5.03.5.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.615.895.479,00	26.877.731.881,00	(2.738.163.798,00)	90,73
5.03.5.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	14.639.149.851,00	14.399.164.230,00	(239.985.412,00)	98,36
5.03.5.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.976.745.628,00	12.478.567.442,00	(2.498.178.388,00)	83,32
5.03.5.03.01.5.2	BELANJA MODAL	1.107.919.000,00	1.002.588.000,00	(105.331.000,00)	90,48
5.03.5.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.107.919.000,00	1.002.588.000,00	(105.331.000,00)	90,48
5.03.5.03.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20.864.386.414,00	15.002.728.445,00	(5.861.657.969,00)	71,91
5.04.5.04.01	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20.864.386.414,00	15.002.728.445,00	(5.861.657.969,00)	71,91
5.04.5.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.717.079.414,00	14.859.023.525,00	(5.858.046.889,00)	71,72
5.04.5.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.266.465.314,00	9.000.787.004,00	(265.678.310,00)	97,13
5.04.5.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.450.609.100,00	5.858.236.521,00	(5.592.368.579,00)	51,19
5.04.5.04.01.5.2	BELANJA MODAL	147.316.000,00	143.704.920,00	(3.611.080,00)	97,58
5.04.5.04.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.316.000,00	143.704.920,00	(3.611.080,00)	97,58
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	328.509.770,00	241.036.640,00	(87.473.130,00)	73,37
5.05.5.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	328.509.770,00	241.036.640,00	(87.473.130,00)	73,37
5.05.5.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	328.509.770,00	241.036.640,00	(87.473.130,00)	73,37
5.05.5.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.509.770,00	241.036.640,00	(87.473.130,00)	73,37
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	6.167.975.247,00	5.967.637.128,00	(200.338.119,00)	96,44
5.06.5.06.01	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	6.167.975.247,00	5.967.637.128,00	(200.338.119,00)	96,44
5.06.5.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.167.975.247,00	5.967.637.128,00	(200.338.119,00)	96,42
5.06.5.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.827.309.747,00	4.636.128.152,00	(191.181.595,00)	96,04
5.06.5.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.665.500,00	1.306.508.976,00	(29.157.524,00)	97,82
5.06.5.06.01.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.06.5.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5.07	PENGHUBUNG	401.080.000,00	308.431.917,00	(92.648.083,00)	76,90
5.07.5.06.01	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	401.080.000,00	308.431.917,00	(92.648.083,00)	76,90
5.07.5.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	401.080.000,00	308.431.917,00	(92.648.083,00)	76,90
5.07.5.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.080.000,00	308.431.917,00	(92.648.083,00)	76,90
6.01	INSPEKTORAT	39.734.364.989,00	37.188.614.109,00	(2.545.750.880,00)	93,59
6.01.6.01.01	INSPEKTORAT	39.734.364.989,00	37.188.614.109,00	(2.545.750.880,00)	93,59
6.01.6.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.255.434.989,00	19.423.383.509,00	(832.051.480,00)	95,89
6.01.6.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.730.598.294,00	12.528.294.824,00	(202.273.470,00)	98,41
6.01.6.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.524.836.675,00	6.895.088.985,00	(629.777.990,00)	91,63
6.01.6.01.01.5.2	BELANJA MODAL	19.478.636.000,00	17.765.230.600,00	(1.713.405.400,00)	91,20
6.01.6.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.266.000,00	9.350.000,00	(916.000,00)	91,08
6.01.6.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.468.634.000,00	17.755.880.600,00	(1.712.753.400,00)	91,20
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.929.219.392,00	15.391.988.940,00	(1.537.230.452,00)	90,92
8.01.8.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.929.219.392,00	15.391.988.940,00	(1.537.230.452,00)	90,92
8.01.8.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.929.219.392,00	15.391.988.940,00	(1.537.230.452,00)	90,92
8.01.8.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0.110.961.942,00	5.846.598.450,00	(264.393.434,00)	95,67
8.01.8.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.262.719.450,00	6.999.802.482,00	(1.272.836.908,00)	84,60
8.01.8.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	2.656.538.000,00	2.656.538.000,00	-	100,00
9.02	KEISTIMEWAAN DIY	6.761.628.976,00	6.216.296.591,00	(545.332.385,00)	91,83
9.02.9.02.01	PANBRADYA KAISTIMEWAN	6.761.628.976,00	6.216.296.591,00	(545.332.385,00)	91,83
9.02.9.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.572.667.976,00	6.055.820.282,00	(516.847.694,00)	92,14
9.02.9.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0.154.603.476,00	5.732.270.432,00	(422.383.044,00)	93,14
9.02.9.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.181.014.500,00	323.949.850,00	(3.857.064.650,00)	77,40
9.02.9.02.01.5.2	BELANJA MODAL	188.961.000,00	160.476.309,00	(28.484.691,00)	84,93
9.02.9.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.961.000,00	159.975.809,00	(28.385.191,00)	84,63
9.02.9.02.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	500.500,00	(300.500,00)	85,42
	JUMLAH BELANJA	6.046.848.748.828,00	5.530.173.261.862,19	(516.675.287.166,81)	91,46



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,  
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.674.896.535.689,00</b>	<b>5.703.100.309.342,23</b>	<b>100,50</b>	<b>5.611.510.924.299,71</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.861.579.698.446,00</b>	<b>1.900.923.074.881,46</b>	<b>102,11</b>	<b>1.876.706.829.354,71</b>
Pajak Daerah	1.668.485.236.037,00	1.588.443.843.923,00	101,20	1.646.559.198.863,00
Retribusi Daerah	34.367.915.101,00	38.512.949.895,00	112,06	36.546.077.142,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	102,57	101.460.382.151,46
Lain-lain PAD yang Sah	64.803.205.854,00	77.627.764.149,92	119,79	92.141.171.197,54
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.805.740.337.243,00</b>	<b>3.794.855.660.531,00</b>	<b>99,71</b>	<b>3.726.454.505.432,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	99,71	3.725.674.576.242,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	805.045.310,00	100,00	780.019.190,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.576.500.000,00</b>	<b>7.321.573.929,77</b>	<b>96,64</b>	<b>8.349.499.513,00</b>
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	94,26	8.349.499.513,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	179.943.929,77	0,00	0,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.046.849.748.828,00</b>	<b>5.530.173.461.667,19</b>	<b>91,46</b>	<b>5.433.160.699.355,67</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.968.292.407.780,00</b>	<b>3.575.258.038.927,29</b>	<b>90,10</b>	<b>3.101.070.722.657,40</b>
Belanja Pegawai	1.678.299.261.750,00	1.561.540.562.725,00	93,04	1.562.236.884.707,39
Belanja Barang dan Jasa	1.266.990.234.707,00	1.039.417.892.655,29	82,04	707.629.279.470,01
Belanja Subsidi	73.414.802.510,00	73.315.381.521,00	99,86	78.044.848.317,00
Belanja Hibah	920.256.898.813,00	878.407.044.213,00	95,45	744.149.764.252,00
Belanja Bantuan Sosial	29.331.210.000,00	22.577.159.813,00	76,97	9.009.947.911,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>723.326.438.796,00</b>	<b>654.839.728.747,39</b>	<b>90,53</b>	<b>940.633.924.931,64</b>
Belanja Modal Tanah	185.827.455.687,00	185.263.842.550,00	94,51	696.800.024.901,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.750.430.670,00	153.066.731.565,00	81,96	137.484.204.942,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.353.042.040,00	66.855.285.344,54	84,25	52.613.388.365,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.341.014.425,00	214.309.752.467,85	95,10	38.021.109.346,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.054.495.974,00	35.344.116.820,00	98,03	15.715.197.377,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>90.726.238.027,00</b>	<b>53.316.587.701,00</b>	<b>58,77</b>	<b>305.639.352.770,00</b>
Belanja Tidak Terduga	90.726.238.027,00	53.316.587.701,00	58,77	305.639.352.770,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.264.504.664.225,00</b>	<b>1.246.759.114.291,51</b>	<b>98,60</b>	<b>1.085.836.698.996,63</b>
Belanja Baji Hasil	713.118.316.167,00	713.118.316.167,00	100,00	693.891.920.604,00
Belanja Bantuan Keuangan	551.386.348.058,00	533.640.798.124,51	96,78	391.944.778.392,63
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(371.953.213.139,00)</b>	<b>172.926.847.675,04</b>	<b>(46,49)</b>	<b>178.330.224.944,04</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>371.953.213.139,00</b>	<b>381.560.546.739,46</b>	<b>102,58</b>	<b>306.122.988.195,42</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>489.453.213.139,00</b>	<b>494.060.546.739,46</b>	<b>100,94</b>	<b>423.712.988.195,42</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	484.453.213.139,00	484.453.213.139,46	100,00	420.567.958.995,42
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	9.607.333.600,00	192,15	3.145.029.200,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>117.500.000.000,00</b>	<b>112.500.000.000,00</b>	<b>95,74</b>	<b>117.590.000.000,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000,00	112.500.000.000,00	100,00	113.690.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>371.953.213.139,00</b>	<b>381.560.546.739,46</b>	<b>102,58</b>	<b>306.122.988.195,42</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>554.487.394.414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>484.453.213.139,46</b>


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

Lampiran 1.3  
 Nomor  
 Tanggal

Peraturan Daerah  
 : 8 TAHUN 2012  
 : 30 AGUSTUS 2012

PEMERINTAH DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta  
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,  
 DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN  
 Organisasi : 1.01.03 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Dasar Hukum	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / Berkurang		
		3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.1	PENDAPATAN DAERAH	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	255.045.414,00	107,66	
1.01.1.01.03.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	255.045.414,00	107,66	
1.01.1.01.03.4.1.02	Retribusi Daerah	539.435.000,00	870.127.183,00	330.692.183,00	161,30	Perda No. 11 Tahun 2011 - Retribusi Jasa Umum, diubah dengan Perda No. 14 Tahun 2019Perda No. 12 Tahun 2011 - Retribusi Jasa Usaha, diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2020
1.01.1.01.03.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.789.644.000,00	2.713.997.231,00	(75.646.769,00)	97,29	Perda No. 5 Tahun 2015 - Lain-lain PAD yang Sah
1.01	BELANJA	1.981.006.857.742,00	1.831.956.017.251,25	(149.050.840.490,75)	92,48	
1.01.03.1.01	PENDIDIKAN	1.908.517.948.242,00	1.763.191.365.627,25	(145.326.582.614,75)	92,34	
1.01.03.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	971.658.525.659,00	880.594.191.883,00	(91.064.333.776,00)	90,63	
1.01.03.1.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.409.042.170,00	1.256.363.600,00	(212.679.100,00)	85,91	
1.01.03.1.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	694.675.900,00	549.414.550,00	(45.261.350,00)	92,19	
1.01.03.1.01.01.01.01.01	BELANJA OPERASI	694.675.900,00	548.414.550,00	(45.261.350,00)	92,39	
1.01.03.1.01.01.01.01.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	594.675.900,00	549.414.550,00	(45.261.350,00)	92,39	
1.01.03.1.01.01.01.01.01.5.1.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	914.365.800,00	746.949.050,00	(167.417.750,00)	81,59	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
9.02.01.9.02.01.09.09.02.6.1.	BELANJA OPERASI	175.918.500,00	162.913.160,00	(23.005.360,00)	86,92	
9.02.01.9.02.01.09.09.02.5.102.	Belanja Barang dan Jasa	175.918.500,00	152.913.150,00	(23.005.350,00)	86,92	
9.02.01.9.02.01.09.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bang	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
9.02.01.9.02.01.09.09.11.5.1.	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
9.02.01.9.02.01.09.09.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(22.896.432.376,00)	(21.164.928.418,00)	1.731.503.960,00	92,53	

  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
*Hamengku Buwono X*  
 HAMENGGU BUWONO X



Kode	Uraian Uraian, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kategori Belanja					
		Operasi		Modal		Tidak Tertaga	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.8.01.01.8.01.03.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan PORA, Etna Budaya Publik, Pengembangan Desa/Kota, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Persekolahan, dan Pesta Publik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, Serta Peningkatan Status Publik di Daerah	2.781.450.000,00	2.715.418.500,00				
8.01.8.01.01.8.01.03.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan PORA, Etna Budaya Publik, Pengembangan Desa/Kota, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Persekolahan, dan Pesta Publik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, Serta Peningkatan Status Publik di Daerah	128.120.000,00	104.200.000,00				
8.01.8.01.01.8.01.03.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGARAHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	338.250.000,00	385.066.600,00				
8.01.8.01.01.8.01.04.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan dan Pengembangan Organisasi	338.250.000,00	385.066.600,00				
8.01.8.01.01.8.01.04.01.02	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Divisi Perencanaan-Organis, Perencanaan Dinas, Evaluasi, dan Media Berkeadilan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	338.250.000,00	385.066.600,00				
8.01.8.01.01.8.01.05	PROGRAM PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.625.180.000,00	707.414.500,00				
8.01.8.01.01.8.01.05.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.025.180.000,00	707.414.500,00				
8.01.8.01.01.8.01.05.01.02	Penyusunan Rencana Perencanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Perencanaan Penyelenggaraan Hari/Keloka, Fasilitas Kerjasama Urat Bersama dan Penghayat Masyarakat di Daerah	271.945.000,00	218.949.000,00				
8.01.8.01.01.8.01.05.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Penyelenggaraan Hari/Keloka, Fasilitas Kerjasama Urat Bersama dan Penghayat Masyarakat di Daerah	853.410.000,00	305.567.500,00				
8.01.8.01.01.8.01.05.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Penyelenggaraan Hari/Keloka, Fasilitas Kerjasama Urat Bersama dan Penghayat Masyarakat di Daerah	194.824.500,00	185.907.000,00				
8.01.8.01.01.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEMERDEKAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS (SARAN FASILITAS) PENANJANGAN KONFLIK SOSIAL	2.736.200.000,00	2.886.208.000,00				
8.01.8.01.01.8.01.06.01	Perencanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Konflik Sosial	2.736.200.000,00	2.886.208.000,00				
8.01.8.01.01.8.01.06.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Keagamaan, Kesehatan, Pemerintahan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	2.308.029.000,00	2.278.859.000,00				
8.01.8.01.01.8.01.06.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Asing, Instansi, Pemerintahan, Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan	428.164.000,00	407.405.000,00				
9	UNDUK KERHUSUSAN	6.494.749.490,00	6.055.820.282,00	188.961.300,00	166.476.309,00		
9.02	KEMERDEKAAN DIY	6.494.749.490,00	6.055.820.282,00	188.961.300,00	166.476.309,00		
9.02.9.02.01	PANITIA KEMERDEKAAN	6.494.749.490,00	6.055.820.282,00	188.961.300,00	166.476.309,00		
9.02.9.02.01.9.02.01	PROGRAM/PENUNJANG UPASAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.009.789.920,00	6.045.820.282,00	188.961.300,00	166.476.309,00		
9.02.9.02.01.9.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.400.000,00	5.300.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.01.02	Aktivitas Keagamaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.740.400.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.01.02.01	Penyediaan Gap dan Tumpang AGN	6.000.000,00	5.800.000.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan APBD	52.600.000,00	51.900.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.300.000,00	1.300.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester/APRD	1.400.000,00	1.400.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi	1.400.000,00	1.350.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02.01	Aktivitas Urutan Perangkat Daerah	188.961.300,00	112.000.700,00	680.300,00	566.500,00		
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02.01.01	Penyediaan Komponen Utama LRA/Penempatan Anggaran Sektor	1.028.900,00	886.500,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02.01.01.01	Penyediaan Perakitan Fisik Tangga	6.100.000,00	3.100.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02.01.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	16.900.000,00	16.900.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02.01.01.01.01.01.02	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang	8.600.000,00	8.576.000,00	600.300,00	500.500,00		
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Harakel APBD	160.000.000,00	88.000.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah			188.361.000,00	158.576.800,00		
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			188.361.000,00	158.576.800,00		
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	11.900.000,00	12.470.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.900.000,00	12.470.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.02	Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	188.100.000,00	168.100.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Reparasi dan Pemrosesan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00	152.900.000,00				
9.02.9.02.01.9.02.01.01.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.04	Perencanaan/Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.200.000,00	12.200.000,00				
	Jumlah	3.985.134.941.729,00	3.575.208.030.927,29	689.820.185.326,00	564.952.726.742,26	98.197.931.056,00	83.318.587.701,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	484.453.213.139,46	420.567.958.995,42
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	484.453.213.139,46	420.567.958.995,42
	Sub Total	-	-
3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	554.487.394.414,50	484.453.213.139,46
	Sub Total	554.487.394.414,50	484.453.213.139,46
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
5	Lain-lain	-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	554.487.394.414,50	484.453.213.139,46

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENKUBUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan /Penurunan	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
Pajak Daerah	1.688.402.302.123,00	1.646.507.580.363,00	41.894.721.760,00	2,54
Retribusi Daerah	23.658.209.445,55	25.774.480.406,75	(2.116.270.961,20)	(8,21)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.233.086.264,59	147.442.541.855,78	5.790.544.608,81	3,93
Lain-lain PAD Yang Sah	79.631.448.010,02	89.967.042.816,85	(10.435.594.806,83)	(11,60)
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.944.825.045.843,16</b>	<b>1.909.691.645.242,38</b>	<b>35.133.400.600,78</b>	<b>1,84</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.794.050.615.221,00	3.725.674.576.242,00	68.376.038.979,00	1,84
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	780.019.190,00	25.026.120,00	3,21
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.794.855.660.531,00</b>	<b>3.726.454.595.432,00</b>	<b>68.401.065.099,00</b>	<b>1,84</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	894.657.714.005,57	96.363.203.404,23	798.294.510.601,34	828,42
Dana Darurat	-	27.978.674.916,00	(27.978.674.916,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	179.943.929,77	-	179.943.929,77	-
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>894.737.657.935,34</b>	<b>124.331.878.320,23</b>	<b>770.405.779.615,11</b>	<b>619,54</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.634.418.364.309,50</b>	<b>5.760.478.118.994,61</b>	<b>873.940.245.314,89</b>	<b>15,17</b>
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	1.561.452.979.212,00	1.558.830.493.941,39	2.622.485.270,61	0,17
Beban Barang dan Jasa	1.112.088.458.698,66	775.568.864.314,21	336.519.594.384,45	43,39
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	73.315.381.521,00	78.044.846.317,00	(4.729.464.796,00)	(6,05)
Beban Hibah	903.175.916.736,15	788.134.032.759,58	115.041.883.976,57	14,60
Beban Bantuan Sosial	21.527.425.033,00	1.492.000.000,00	20.035.425.033,00	1.342,86
Beban Penyisihan Piutang	280.344.568,76	635.036.249,88	(354.691.681,12)	(55,85)
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>3.671.840.505.769,57</b>	<b>3.202.765.273.582,06</b>	<b>469.075.232.187,51</b>	<b>14,65</b>
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>				
Beban Penyusutan Peralatan Mesin	181.338.054.568,87	170.507.700.707,48	10.830.353.861,39	6,35
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.053.028.858,25	74.322.205.800,66	125.630.823.057,59	169,04
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	279.635.404.696,72	124.689.846.696,47	154.945.558.000,25	124,26
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	868.288.993,13	800.784.677,17	67.514.015,96	8,43
Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.398.000.980,84	1.000.986.728,07	397.014.252,77	39,66
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>663.192.788.105,81</b>	<b>371.321.524.908,85</b>	<b>291.871.263.196,96</b>	<b>78,60</b>
<b>BEBAN TRANSFER</b>				
Beban Bagi Hasil	716.105.738.931,00	697.652.615.144,00	18.453.123.787,00	2,65
Beban Bantuan Keuangan	533.640.798.124,51	381.944.778.392,63	141.696.019.731,88	36,15
<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	<b>1.249.746.537.055,51</b>	<b>1.089.597.393.536,63</b>	<b>160.149.143.518,88</b>	<b>14,70</b>
<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>				
Beban Tak Terduga	35.690.160.008,13	265.756.533.763,04	(230.066.373.754,91)	(66,57)
<b>JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>35.690.160.008,13</b>	<b>265.756.533.763,04</b>	<b>(230.066.373.754,91)</b>	<b>(66,57)</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>5.620.469.990.939,02</b>	<b>4.929.380.725.790,58</b>	<b>691.089.265.148,44</b>	<b>13,99</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>1.013.948.373.370,48</b>	<b>831.097.393.204,03</b>	<b>182.850.980.166,45</b>	<b>22,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	8.812.915.207,55	6.376.401.624,00	2.436.513.583,55	38,21
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>8.812.915.207,55</b>	<b>6.376.401.624,00</b>	<b>2.436.513.583,55</b>	<b>38,21</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	3.091.013.235,18	3.037.248.637,47	53.764.597,71	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>3.091.013.235,18</b>	<b>3.037.248.637,47</b>	<b>53.764.597,71</b>	<b>1,77</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.721.901.972,37</b>	<b>3.339.152.986,53</b>	<b>2.382.748.985,84</b>	<b>71,36</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>1.019.670.275.342,85</b>	<b>834.436.546.190,56</b>	<b>185.233.729.152,29</b>	<b>22,20</b>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	11.290.686.277.272,30	10.343.362.322.871,10
Surplus/Defisit - LO	1.019.670.275.342,85	834.436.546.190,56
RK PPKD	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(359.778.956.271,55)	112.887.408.210,59
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	(359.778.956.271,55)	112.887.408.210,59
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>11.950.577.596.343,60</b>	<b>11.290.686.277.272,30</b>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NERACA  
 PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	574.188.719.904,44	503.545.195.680,40
Kas di Kas Daerah	513.471.984.112,22	441.671.236.637,40
Kas di Bendahara Penerimaan	38.000.970,00	52.675.210,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	293.567.198,00	6.518.460,00
Kas di BLUD	36.196.141.717,28	32.677.963.006,06
Kas Dana BOS	4.488.067.667,00	10.044.731.811,00
Kas Lainnya	19.680.958.239,94	19.092.070.555,94
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	129.631.200,00	171.173.000,00
Piutang Retribusi Daerah	452.715.990,00	1.847.960.188,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.643.430.509,66	3.320.144.809,85
Piutang Lainnya	1.635.674.799,30	1.635.674.799,30
Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.066.973.529,52)	(1.343.159.110,48)
Beban Dibayar Dimuka	918.852.261,84	815.983.222,54
Persediaan	122.928.387.222,57	181.099.569.022,41
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>705.810.418.358,19</b>	<b>691.092.541.612,02</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	5.054.340.970,10	14.688.995.860,10
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.696.428.576.600,55	1.640.658.177.122,57
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>1.701.482.917.570,65</b>	<b>1.655.347.172.982,67</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	4.574.164.906.208,00	4.238.954.451.307,00
Peralatan dan Mesin	1.709.712.271.491,82	1.512.711.423.026,27
Gedung dan Bangunan	2.911.445.504.376,58	2.854.877.023.082,53
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.899.141.256.584,91	3.159.549.339.267,57
Aset Tetap Lainnya	369.190.427.280,26	241.819.072.793,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.514.973.384,40	72.397.801.549,65
Akumulasi Penyusutan	(4.192.591.793.621,47)	(3.601.196.628.480,27)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>9.336.577.545.704,50</b>	<b>8.479.112.482.546,08</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	-	-
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	139.193.552.185,00	257.752.887.426,96
Aset Tidak Berwujud	87.896.425.719,00	82.178.412.601,00
Aset Lain-lain	58.999.066.685,37	170.052.579.232,24
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(30.694.949.118,52)	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>255.394.095.470,85</b>	<b>509.983.879.260,20</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11.999.264.977.104,20</b>	<b>11.335.536.076.401,00</b>

Uraian	2021	2020
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.681.325.489,94	19.091.982.540,94
Pendapatan Diterima Dimuka	1.636.017.146,47	1.623.129.778,68
Utang Belanja	2.661.564.418,15	2.413.635.867,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	24.708.473.706,00	21.721.050.942,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>48.687.380.760,56</b>	<b>44.849.799.128,62</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>48.687.380.760,56</b>	<b>44.849.799.128,62</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	11.950.577.596.343,60	11.290.686.277.272,30
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11.950.577.596.343,60</b>	<b>11.290.686.277.272,30</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>11.999.264.977.104,20</b>	<b>11.335.536.076.401,00</b>



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku*  
HAMENGGU BUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

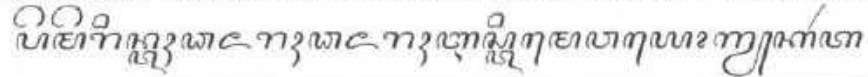
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	1.688.443.843.923,00	1.646.559.198.863,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	38.512.949.895,00	36.546.077.142,71
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.338.516.913,54	101.460.382.151,46
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.228.184.713,92	90.959.267.630,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	132.461.145.334,00	114.252.471.928,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	154.375.404,00	24.870.747,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.224.852.487.000,00	1.227.647.676.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.079.416.445.404,00	1.029.119.335.346,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.279.572.655.079,00	1.286.576.228.221,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	77.593.507.000,00	68.053.994.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	805.046.310,00	780.019.190,00
15	Penerimaan Hibah	7.141.630.000,00	8.349.499.513,00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	-
17	Penerimaan Lainnya	179.943.929,77	-
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas Masuk</b>	<b>5.701.700.729.906,23</b>	<b>5.610.329.020.732,71</b>
17	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
18	Pembayaran Pegawai	1.561.540.552.725,00	1.562.236.884.707,39
19	Pembayaran Barang dan Jasa	1.039.417.892.655,29	707.629.279.470,01
20	Pembayaran Bunga	-	-
21	Pembayaran Subsidi	73.315.381.521,00	78.044.846.317,00
22	Pembayaran Hibah	878.407.044.213,00	744.149.764.252,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	22.577.159.813,00	9.009.947.911,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	533.640.798.124,51	391.944.778.392,63
25	Pembayaran Tidak Terduga	53.316.587.701,00	305.639.352.770,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	713.118.316.167,00	693.891.920.604,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>4.875.333.732.919,80</b>	<b>4.492.546.774.424,03</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>826.366.996.986,43</b>	<b>1.117.782.246.308,68</b>
32			
33	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
34	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
35	Pencairan Dana Cadangan	-	-
36	Penjualan atas Tanah	-	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	136.200.000,00	525.929.467,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	330.534.999,00	61.302.989,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	154.940.400,00	585.730.111,00
41	Penjualan Aset Lainnya	777.904.037,00	8.941.000,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	9.607.333.600,00	3.145.029.200,00
44	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>11.006.913.036,00</b>	<b>4.326.932.767,00</b>
45	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
47	Perolehan atas Tanah	185.263.842.550,00	696.800.024.901,00
48	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	153.066.731.565,00	137.484.204.942,00
49	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	66.855.285.344,54	52.613.388.365,00
50	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.309.752.467,85	38.021.109.346,84
51	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	35.344.116.820,00	15.382.208.041,00
52	Perolehan atas Aset Lainnya	-	332.989.336,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	112.500.000.000,00	113.590.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	4.000.000.000,00
55	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>767.339.728.747,39</b>	<b>1.058.223.924.931,64</b>
56	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(756.332.815.711,39)</b>	<b>(1.053.896.992.164,64)</b>

No	Uraian	2021	2020
57			
58	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
59	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
69	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-	-
70	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
80	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	-
81	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	-	-
82			
83	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
84	<b>Arus Masuk Kas:</b>		
85	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	205.414.319.183,62	116.756.838.799,00
86	Pengembalian UP/TU/GU	32.602.763.836,00	74.140.737.793,37
87	Pengesahan SPJ UP/TU/GU	652.114.993.038,00	1.480.627.772.698,63
88	Sisa uang persediaan	234.626.413,00	-
89	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>890.366.702.470,62</b>	<b>1.651.525.349.291,00</b>
90	<b>Arus Keluar Kas:</b>		
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	205.414.319.183,62	116.756.838.799,00
92	Penerbitan SP2D UP/TU/GU	664.952.383.287,00	1.534.768.510.492,00
93	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>890.366.702.470,62</b>	<b>1.651.525.349.291,00</b>
94	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	-	-
95	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>70.034.181.275,04</b>	<b>63.885.254.144,04</b>
96	<b>Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>484.453.213.139,46</b>	<b>420.567.958.995,42</b>
97	<b>Saldo akhir kas di BUD</b>	<b>513.471.984.112,22</b>	<b>441.671.236.637,40</b>
98	<b>Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran</b>	<b>293.199.948,00</b>	<b>6.518.460,00</b>
99	<b>Saldo akhir kas di bendahara penerimaan</b>	<b>38.000.970,00</b>	<b>52.675.210,00</b>
100	<b>Saldo akhir kas di BLUD</b>	<b>36.196.141.717,28</b>	<b>32.677.963.006,06</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS</b>	<b>4.488.067.667,00</b>	<b>10.044.731.811,00</b>
	<b>Saldo Akhir Kas Lainnya di Rekening Sumbangan</b>	-	<b>88.015,00</b>
102	<b>Saldo Akhir Kas - SILPA</b>	<b>554.487.394.414,50</b>	<b>484.453.213.139,46</b>
	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak</b>	<b>367.250,00</b>	-
103	<b>Kas Lainnya</b>	<b>19.680.958.239,94</b>	<b>19.091.982.540,94</b>
104	<b>Saldo Akhir Kas - Neraca</b>	<b>574.168.719.904,44</b>	<b>503.545.195.680,40</b>


  
 GUBERNUR GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

## PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



### BAB 1 PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas, suatu entitas pelaporan.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950

BAB 7  
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 yang sangat dinamis sebagai dampak terjadinya Pandemi *Covid-19* sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemic *Covid-19*. Laporan Keuangan Tahun 2021 selain disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 30 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 49 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Pemda DIY. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki Pemda DIY, sedangkan untuk penyajian aset tetap dan persediaan di neraca sumber datanya berasal dari Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = (4 + 5 - 6)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	<b>Piutang Pajak</b>				
		Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	122.067.000,00	-	32.086.800,00	89.979.200,00
		Tagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	49.106.000,00	-	9.453.000,00	39.653.000,00
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>171.173.000,00</b>	<b>-</b>	<b>41.541.800,00</b>	<b>129.631.200,00</b>
1	Dinas Pariwisata	<b>Piutang Retribusi</b>				
		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Piutang Retribusi Pelayanan Sampah	489.293.338,00	-	41.827.348,00	447.465.990,00
3	DPUESDM (Balai PIALAM)	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.353.416.850,00	-	1.363.416.850,00	-
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.847.960.188,00</b>	<b>-</b>	<b>1.395.244.198,00</b>	<b>452.715.990,00</b>
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>				
		Piutang Hasil dari Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah di Jangkung, Wredomartani, Ngemplak, Sernan)	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	216.998.281,55	-	3.500.000,00	213.498.281,55
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Piutang Denda Pajak	41.078.450,00	-	7.284.600,00	33.793.850,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir (DPM dan LDPM)	-	337.016.400,00	194.104.400,00	142.914.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Piutang Pendapatan Denda Dana Bergulir BUKP	-	124.996.000,00	-	124.996.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Piutang Pendapatan Bunga Dana Bergulir	-	4.790.876.000,00	2.557.596.518,00	2.233.279.482,00
7	Dinas Kesehatan (RS Ghrasia)	Piutang Pendapatan BLUD	1.806.046.826,00	17.042.358.218,01	17.066.161.247,00	1.590.243.600,01
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	Piutang Pendapatan BLUD	132.782.859,00	-	60.702.500,00	82.080.359,00
9	Dinas Kesehatan (RS Respira)	Piutang Pendapatan BLUD	1.238.626.191,00	4.534.955.887,00	1.553.507.939,00	4.219.973.139,00
10	DPUESDM (Balai PIALAM)	Piutang Pendapatan	-	-	-	-
11	DPUESDM (Balai PIALAM)	Piutang Denda Retribusi	82.663.399,30	66.631.097,00	152.294.496,30	-
12	Disperindag	Piutang Hasil dari Pemakaian BMD yang tidak dipisahkan	-	635.798,00	-	635.798,00
		<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.320.144.809,85</b>	<b>26.900.437.400,01</b>	<b>21.577.151.700,30</b>	<b>8.843.430.509,56</b>
		<b>JUMLAH PIUTANG PENDAPATAN</b>	<b>5.339.277.997,85</b>	<b>26.900.437.400,01</b>	<b>23.013.937.698,30</b>	<b>9.225.777.699,56</b>
1	Dinas Pertanian	Piutang Lainnya	1.635.674.799,30	-	-	1.635.674.799,30
		<b>JUMLAH PIUTANG LAINNYA</b>	<b>1.635.674.799,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.635.674.799,30</b>
1	Dinas Kesehatan (RS Ghrasia)	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>				
		Sewa tanah Magersani milik Sultan Ground	71.680.333,33	82.333.333,33	71.680.333,33	62.333.333,33
2	Dinas Kesehatan	Sewa tanah untuk tower antena nptel	25.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
3	Dinas Kesehatan (RS Respira)	Sewa Tanah Warga Palbapang pada Dinkes (RS Respira)	-	17.875.000,00	-	17.875.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kec. Tamori Kulon Progo	986.301,37	986.301,37	986.301,37	986.301,37
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sewa ruangan kantor milik Pemdes Argomulyo Kec. Sedayu Bantul	14.641.095,89	14.641.095,89	14.641.095,89	14.641.095,89
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Asuransi	679.839.158,65	656.724.864,73	679.839.158,65	656.724.864,73
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Dikmen Gunung Kidul)	Sewa tanah milik kas desa pada SMKN 1 Tanjunghari	23.833.333,30	18.333.333,30	23.833.333,30	18.333.333,30
8	Dinas Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perpekoran)	Sewa tanah lapangan parkir telukan Maguwoharjo	-	127.958.333,21	-	127.958.333,21
		<b>JUMLAH BEBAN DIBAYAR DIMUKA</b>	<b>815.983.222,54</b>	<b>918.852.261,84</b>	<b>815.983.222,54</b>	<b>918.852.261,84</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>7.790.936.019,69</b>	<b>27.819.289.661,85</b>	<b>23.829.920.920,84</b>	<b>11.780.304.760,70</b>



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pendapatan Daerah	9.225.777.699,56	3.066.973.529,51	6.158.804.170,05
	a. Piutang Pajak	129.631.200,00	120.315.800,00	9.315.400,00
	b. Piutang Retribusi	452.715.990,00	7.487.329,95	445.228.660,05
	c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	-	-	-
	d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	8.643.430.509,56	2.939.170.399,56	5.704.260.110,00
	Piutang Lainnya	1.535.674.799,30	-	1.535.674.799,30
2	<b>JUMLAH</b>	<b>10.861.452.498,86</b>	<b>3.066.973.529,51</b>	<b>7.794.478.969,35</b>

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	185.000.000,00	185.000.000,00	-
		241.000.000,00	241.000.000,00	-
		136.500.000,00	136.500.000,00	-
		1.412.650.000,00	1.412.650.000,00	-
		<b>1.975.150.000,00</b>	<b>1.975.150.000,00</b>	-
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	92.422.098,00	92.422.098,00	-
		557.715.775,00	283.857.887,50	283.857.887,50
		64.950.000,00	64.950.000,00	-
		55.000.000,00	55.000.000,00	-
		50.800.000,00	50.800.000,00	-
		80.000.000,00	80.000.000,00	-
		25.000.000,00	25.000.000,00	-
		165.734.227,00	165.734.227,00	-
		55.615.598,00	55.615.598,00	-
		150.000.000,00	150.000.000,00	-
		166.057.582,00	166.057.582,00	-
		239.912.400,00	239.912.400,00	-
		400.736.502,00	400.736.502,00	-
		184.909.300,00	184.909.300,00	-
		86.560.178,00	43.280.089,00	43.280.089,00
		38.652.204,00	3.865.220,40	34.786.983,60
		189.807.300,00	16.960.730,00	152.826.570,00
		135.321.600,00	13.532.160,00	121.789.440,00
		<b>2.729.194.764,00</b>	<b>2.092.653.793,90</b>	<b>636.540.970,10</b>
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	133.500.000,00	133.500.000,00	-
		<b>133.500.000,00</b>	<b>133.500.000,00</b>	-
4	BUKP	440.000.000,00	2.200.000,00	437.800.000,00
		4.000.000.000,00	20.000.000,00	3.980.000.000,00
		<b>4.440.000.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>4.417.800.000,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.277.844.764,00</b>	<b>4.223.503.793,90</b>	<b>5.054.340.970,10</b>

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
 HAMENGGKO BLIWONO X



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR            TAHUN  
 TENTANG  
 PERINGKANGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/lembaga/Prak ke Tiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah Modal yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa modal yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9-7+8	10-6-9	11	12	13-9-12
1	2013	PT. BANK BPD DIY	Perda No. 5 Tahun 2013	Uang tunai	2.040.000.000,00	795.440.000,00	112.500.000,00	907.500.000,00	1.132.500.000,00	84.955.839.874,22	-	907.500.000,00
2	2013	PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL	Perda No. 5 Tahun 2013	Uang tunai dan barang	49.999.500,00	31.144.910,00	-	31.144.910,00	18.845.090,00	1.044.171.700,00	-	31.144.910,00
3	2013	PT. TAPU MARTANI	Perda No. 5 Tahun 2013	Uang tunai	49.999.500,00	49.999.500,00	-	49.999.500,00	-	3.837.592.289,00	-	49.999.500,00
4	2013	PT. ASURANSI BANGUN ASHROA	Perda No. 5 Tahun 2013	Uang tunai	3.900.000,00	750.000,00	-	750.000,00	3.150.000,00	1.10.733.883,00	-	750.000,00
5	2013	BUKP	Perda No. 5 Tahun 2013	Uang tunai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	8.398.209.397,32	-	20.000.000,00
6	2020	PERUMDA AIR BERSIH TERTAMA DIY	Perda No. 10 Tahun 2020	Uang tunai Barang	12.500.000.000,00 456.528.716,2013,00	12.500.000,000 179.222.362,679	12.500.000,000 179.222.362,679,00	25.000.000,000,00 368.444.725.368,00	12.520.000,000,00 98.083.990.843,00	96.338.516.913,54	-	25.000.000,000,00 368.444.725.368,00
						<b>909.834.410.000,01</b>	<b>303.782.562.679,00</b>	<b>1.392.839.135.398,00</b>	<b>1.240.079.086.943,00</b>	<b>96.338.516.913,54</b>	<b>-</b>	<b>1.392.839.135.398,00</b>

  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 HAME NGKU BUWONO X



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN**  
**ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.954.250.582.672,30	241.432.161.582,16	101.087.505.199,00	2.094.595.239.055,46
2	Dinas Kesehatan	247.388.390.073,78	35.228.744.788,76	9.691.924.921,00	272.925.209.941,54
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	618.148.686.995,60	446.812.980,00	439.582.305.827,02	179.013.194.148,58
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	4.877.406.559.764,32	1.585.810.251.401,85	57.019.308.923,30	6.406.197.502.242,87
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.802.512.567,00	4.281.131.775,00	284.555.000,00	16.799.089.342,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.002.228.387,82	23.266.150.360,82	13.029.474.232,16	80.238.904.516,48
7	Dinas Sosial	142.024.602.427,40	5.627.509.700,00	529.891.636,08	147.122.220.491,32
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	27.809.161.122,00	257.406.160,00	6.050.000,00	28.066.517.282,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	160.252.273.662,92	23.093.721.375,00	915.124.144,00	182.430.870.813,92
10	Dinas Perhubungan	266.493.944.793,86	10.398.557.571,00	33.256.850.951,00	243.625.651.413,86
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	109.977.388.199,77	7.629.042.452,00	1.137.415.825,00	116.469.014.826,77
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23.126.213.610,00	113.222.852.259,30	143.722.247,00	136.205.343.622,30
13	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	7.155.795.774,91	268.840.700,00	-	7.424.636.474,91
14	Dinas Kebudayaan	597.817.224.414,76	36.708.187.017,01	42.572.818.331,01	591.952.793.100,76
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	199.811.314.523,71	39.968.509.446,00	21.275.448.903,00	218.504.375.066,71
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	229.315.810.850,96	37.667.511.882,58	11.654.578.971,04	255.328.743.762,50
17	Dinas Pariwisata	61.095.518.743,01	24.101.012.675,01	600.919.575,00	84.695.611.843,02
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	282.337.152.824,49	1.948.692.648,00	15.111.500,00	284.268.733.972,49
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.697.232.897,00	3.886.447.000,00	2.014.776.900,00	55.568.902.997,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.008.367.831,98	1.680.719.565,00	71.971.500,00	76.617.115.896,98
21	Sekretariat Daerah	280.809.027.018,86	35.101.035.973,77	2.288.740.128,00	313.622.222.864,63
22	Sekretariat DPRD	601.157.520.487,60	261.231.545,50	400.000,00	601.418.352.033,10
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.103.177.478,00	289.270.000,00	695.660.826,00	16.696.786.652,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.033.042.935.982,93	418.488.039.785,16	487.614.242.844,69	963.916.732.924,40
25	Badan Kepegawaian Daerah	28.129.492.576,00	1.727.560.300,00	-	29.857.052.876,00
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	39.992.672.095,00	1.052.680.520,00	-	41.045.352.615,00
27	Badan Penghubung Daerah	29.825.119.919,00	168.840.000,00	10.500.000,00	29.983.459.919,00
28	Inspektorat	20.571.670.534,42	39.756.691.633,00	21.964.401.233,00	38.363.960.934,42
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.882.606.134,98	171.215.700,01	41.587.000,00	9.012.234.834,99
30	Panradya Kaistimewan	4.873.928.541,96	2.444.404.908,00	117.758.980,00	7.200.574.569,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.080.309.111.026,30</b>	<b>2.696.393.133.906,93</b>	<b>1.247.532.905.607,30</b>	<b>13.529.169.339.326,00</b>

  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
*Hamengkubuwono X*  
 HAMENKUBUWONO X

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	TANAH	4.238.954.451.307,00	362.590.712.572,00	27.380.257.671,00	4.574.164.906.208,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.512.711.423.026,27	254.703.485.051,63	57.702.636.586,08	1.709.712.271.491,82
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.854.877.023.082,53	236.615.153.491,17	180.046.672.197,12	2.911.445.504.376,58
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3.159.549.339.267,57	1.045.779.609.201,39	306.187.691.884,05	3.899.141.256.584,91
5	ASET TETAP LAINNYA	241.819.072.793,33	783.962.326.583,74	656.590.972.096,81	369.190.427.280,26
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	72.397.801.549,65	12.741.847.007,00	19.624.675.172,25	65.514.973.384,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.080.309.111.026,30</b>	<b>2.696.393.133.906,93</b>	<b>1.247.532.905.607,31</b>	<b>13.529.169.339.326,00</b>


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	BERTAMBAH					MUTASI			BERKURANG			REKLASIFIKASIPEN- NGHAPIUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
			ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN MESIN	ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN MESIN	ASSET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.352.908.232,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352.908.232,40
2	Dinas Kesehatan	198.207.250,00	-	613.830.500,00	-	-	-	-	393.738.900,00	-	-	-	-	-	499.299.250,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.628.377.670,00	-	4.943.790.150,00	8.923.305.370,00	-	-	-	858.554.000,00	1.188.307.500,00	-	-	-	-	39.451.071.690,00
4	Dinas Perumahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00	-	-	-	-	-	-	4.947.963.000,00	4.735.198.790,00	-	-	-	-	11.212.875.900,00
5	Badan Kesehatan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.367.000,00
6	Seruan Polisi Pamong Praja	53.815.000,00	-	-	-	-	-	-	53.815.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Sosial	494.557.600,00	-	-	-	-	-	-	146.902.000,00	-	-	-	-	-	307.655.600,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	-	49.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.014.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.009.968.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.009.968.600,00
10	Dinas Pertumbuhan	513.898.450,00	-	659.934.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.173.802.450,00
11	Dinas Keadayaan	1.496.029.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.496.029.592,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, dan Pengendalian Penduduk	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700.000,00
13	Dinas Puncutindakan dan Aspek Daerah	785.658.000,00	-	-	-	-	-	-	108.885.000,00	-	-	-	-	-	676.773.000,00
14	Dinas Perlakuan dan Kelakuan	86.433.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.433.000,00
15	Dinas Peranan dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.369.625,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	416.150.700,00	-	-	1.129.562.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.545.502.700,00
17	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.700.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	286.427.840,00	1.874.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160.852.840,00
19	Sekretariat Daerah	81.912.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.912.800,00
20	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00
21	Inspektoral	13.923.872.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.923.872.500,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	590.008.700,00	-	429.104.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929.113.200,00
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	286.917.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.917.000,00
24	Dinas Koperasi	-	-	809.566.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.566.600,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>72.397.801.549,65</b>	<b>1.874.425.000,00</b>	<b>7.505.226.755,00</b>	<b>10.052.657.370,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.391.630.000,25</b>	<b>5.923.506.290,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.514.973.384,40</b>	

  
**GUBERNUR**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
  
**HANENGGU BUWONO X**

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.269.359.777,79	4.761.197.755,53	-	14.030.557.533,32
2	Dinas Kesehatan	2.282.526.105,00	943.510.000,00	265.290.045,00	2.940.746.060,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	178.099.376.810,43	-	118.637.980.260,03	59.461.396.550,40
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	162.090.000,00	-	-	162.090.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	163.977.600,00	-	13.068.814,76	150.908.785,24
6	Satuan Polisi Pamong Praja	72.447.758,00	151.793.500,00	66.000.000,00	158.241.258,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.440.419.500,00	-	1.006.969.500,00	433.450.000,00
8	Dinas Sosial	438.988.084,00	99.200.000,00	298.445.000,00	239.743.084,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.789.032.698,41	132.900.000,00	394.235.456,13	6.527.697.242,28
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	662.762.750,00	-	-	662.762.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.609.793.897,00	-	349.101.481,48	4.260.692.415,52
12	Dinas Perhubungan	8.811.574.658,00	17.046.300,00	4.342.777.850,00	4.485.843.108,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.320.202.503,00	1.161.649.500,00	3,00	7.481.852.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	903.546.621,00	151.500.000,00	237.945.621,00	817.101.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.385.267.040,00	86.350.000,00	147.500,00	2.471.469.540,00
16	Dinas Kebudayaan	11.817.623.914,36	-	268.261.494,69	11.549.362.419,67
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.244.592.930,00	3.277.032.000,00	29.139.865,00	9.492.485.065,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	833.220.262,00	6.047.245.041,82	196.927.000,00	6.683.538.303,82
19	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	-	-	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.983.334.224,65	-	282.360.211,85	1.680.974.012,80
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	411.793.500,00	-	-	411.793.500,00
22	Sekretariat Daerah	2.810.262.278,97	163.195.000,00	217.919.368,97	2.755.537.910,00
23	Badan Penghubung Daerah	2.044.909.068,96	0,07	232.925.963,79	1.811.983.105,24
24	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	-	-	1.120.433.245,00
25	Inspektorat	463.391.771,44	83.710.000,00	2.536.571,44	544.565.200,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.339.114.325,00	-	-	9.339.114.325,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	247.126.483.040,19	262.508.666,76	145.086.427.949,39	102.302.563.757,56
29	Badan Kepegawaian Daerah	775.578.100,00	-	161.600,00	775.416.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	624.475.750,00	-	-	624.475.750,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>509.983.879.263,20</b>	<b>17.338.837.764,19</b>	<b>271.928.621.556,53</b>	<b>255.394.095.470,85</b>

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X



LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR ..... TAHUN  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
 PER 31 DESEMBER 2021

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								
Jumlah								



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	19.091.982.540,94	589.342.949,00	-	19.681.325.489,94
2	Pendapatan Diterima Di Muka	1.623.129.778,68	1.636.017.146,47	1.623.129.778,68	1.636.017.146,47
3	Utang Belanja	2.413.635.867,00	2.661.564.418,15	2.413.635.867,00	2.661.564.418,15
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	21.721.050.942,00	24.708.473.706,00	21.721.050.942,00	24.708.473.706,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.849.799.128,62</b>	<b>29.595.398.219,62</b>	<b>25.757.816.587,68</b>	<b>48.687.380.760,56</b>

  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
NIHIL					
JUMLAH					



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku*  
HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NCMCR TAHUN  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021  
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								
Jumlah			-	-	-		-	


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
*Hamengku*  
 HAMENGGU BUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	BUMBUK perusahaan Daerah	Sumber (d)	Status (h)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Statistik	BPPDB	Ekuitas Lainnya	Labas Dibayar	Total Ekuitas	% Saham Daerah (metode akribas)	Kapitalisasi Daerah (metode skuitas)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17 = 14+15+16	18	19	
<b>Bidang Perbankan</b>																			
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH PRANINGA DIY	APBD	BUMK Penyelenggaraan Usaha	10.317.803.971.444,00	317.855.691.281,00	129.583.692.012,00	15.765.333.170.742,00	12.080.565.235.045,00	315.844.448.005,00	13.096.412.686.045,00	1.690.369.030.060,00	142.881.000.000,00	-	-	826.381.452.086,00	-	2.606.661.492.395,00	51,02%	1.254.031.248.322,37
<b>Bidang Lembaga Keuangan Non Bank</b>																			
1	BUMDA EMBAH PERHATI PESEMAN (BAPR)	APBD	BUMK Penyelenggaraan Usaha	254.532.029.104,00	6.427.319.400,00	17.010.280.956,93	268.349.176.461,37	200.657.363.779,00	30.395.295.757,98	231.052.659.536,98	1.549.384.400.260,00	142.881.000.000,00	-	-	826.381.452.086,00	-	2.668.666.492.056,00		1.284.071.248.322,37
<b>Bidang Arsitek</b>																			
1	PT ANDHYA MITRA INTERBUKAL	APBD	BUMK Penyelenggaraan Usaha	21.547.834.483,00	5.427.318.456,00	17.479.098.866,93	266.078.176.861,57	208.657.463.779,00	30.355.255.757,98	231.852.555.536,98	55.917.816.524,50	-	-	-	-	-	55.917.816.524,50	83,13%	49.903.311.104,91
<b>Bidang Perdagangan</b>																			
1	PT THALAMARTANI	APBD	BUMK Penyelenggaraan Usaha	87.264.292.714,10	21.592.115.225,00	-	53.042.548.375,00	5.511.086.877,69	6.337.978.922,00	12.448.761.804,69	40.594.198.372,00	-	-	-	-	-	49.354.188.572,00	99,16%	42.624.368.209,49
2	PERUMDA MABERSH BIRITAWA DIY	APBD	BUMK Penyelenggaraan Usaha	12.482.454.379,69	155.303.347.752,26	-	158.082.201.932,48	1.200.025.668,94	-	1.200.025.668,94	956.733.675.233,00	-	-	-	-	-	960.203.875.233,00	100,00%	101.722.002.079,00
<b>Total Seluruh Bidang Industri</b>																			
				18.693.384.471.197,40	311.157.270.686,00	146.603.964.878,93	16.133.145.203.137,28	13.692.696.724.006,28	257.407.754.285,98	13.350.634.468.353,26	2.051.786.274.549,95	142.881.000.000,00	-	-	826.381.452.086,00	-	3.001.006.716.744,56		1.039.900.177.122,37



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	BUMD/ perusahaan Daerah	Sumber (a)	Status (b)	Pendapatan	Beban	Labar (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Labar (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bidang Perbankan</b>									
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DIY	APBD	BUMD, Penyertaan Modal	1.190.033.004.351,00	834.486.669.813,00	355.546.334.538,00	4.214.596.848,00	-	13.760.652.754,00
	<b>Sub Total (1)</b>			<b>1.190.033.004.351,00</b>	<b>834.486.669.813,00</b>	<b>355.546.334.538,00</b>	<b>4.214.596.848,00</b>	<b>-</b>	<b>13.760.652.754,00</b>
<b>Bidang Lembaga Keuangan Non Bank</b>									
1	BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN (BUKP)	APBD	BUMD, Penyertaan Modal	42.747.362.782,67	33.550.690.026,47	9.196.672.756,20	86.570.370,72	-	-
	<b>Sub Total (2)</b>			<b>42.747.362.782,67</b>	<b>33.550.690.026,47</b>	<b>9.196.672.756,20</b>	<b>86.570.370,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bidang Aneka Usaha</b>									
1	PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL	APBD	BUMD, Penyertaan Modal	91.412.390.672,00	33.367.768.607,00	58.044.622.065,00	53.765.370.496,00	-	4.279.251.569,00
	<b>Sub Total (3)</b>			<b>91.412.390.672,00</b>	<b>33.367.768.607,00</b>	<b>58.044.622.065,00</b>	<b>53.765.370.496,00</b>	<b>-</b>	<b>4.279.251.569,00</b>
<b>Bidang Produksi dan Perdagangan</b>									
1	PD. TARUMARTANI	APBD	BUMD, Penyertaan Modal	43.467.279.710,44	22.084.350.632,83	21.382.929.077,61	6.272.322.196,61	-	15.110.606.881,01
2	PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA DIY	APBD	BUMD, Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
	<b>Sub Total (4)</b>			<b>43.467.279.710,44</b>	<b>22.084.350.632,83</b>	<b>21.382.929.077,61</b>	<b>6.272.322.196,61</b>	<b>-</b>	<b>15.110.606.881,01</b>
	<b>Total Seluruh Bidang Industri</b>								